

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA**
(Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Teguh Hermawan

NPM. 1421020227

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2018 M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA**
(Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

Teguh Hermawan

NPM. 1421020227

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2018 M

ABSTRAK

Kegiatan pemanfaatan panas bumi di Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar karena mayoritas penduduk setempat merupakan petani kopi dan juga sayuran. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan lahan pertanian, hingga menyebabkan tanaman petani rusak. Bahkan juga menyebabkan habitat hewan di sekitaran Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) terganggu. Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di daerah di lakukan oleh bupati/walikota kepala daerah tingkat II. Sehingga dalam permasalahan ini pemerintah daerah kabupaten tanggamus yang ditugaskan untuk melakukan upaya pengendalian pencemaran udara di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP). Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara, 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tanggamus.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kabupaten tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP), 2) untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten tanggamus. Penelitian menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun kelapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara adalah 1) Pemantauan kualitas udara ambien melalui metode *Passive Sampler*, 2) Pengawasan preventif dan refresif atau pengawasan rutin dan pengawasan sewaktu-waktu.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara sudah sesuai dengan syaria Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Pendapat penulis mengenai pencemaran udara yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu menimbulkan sisi positif dan negatif. Sisi positif Pembangkit Listrik Tenaga Panas mampu menghasilkan listrik untuk masyarakat. Sisi negatif udara di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas mengalami pencemaran.

Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus untuk memberikan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pengendalian pencemaran udara.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya pemerintah daerah dalam pengendalian penceamran udara (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)

Nama Mahasiswa: Teguh Hermawan

NPM : 1421020227

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung

Pembimbing I

Dra. Firdaweri, M.H.I.

NIP. 195509191982032004

Pembimbing II

Eti Karim, S.H., M.Hum.

NIP. 197308162003123003

Ketua Jurusan

Drs. Susiadi AS, M.Sos.i.

NIP. 19580817199303100

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian pencemaran Udara (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus), di susun oleh Teguh Hermawan, NPM: 1421020227, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Selasa, 17 Juli 2018, Waktu : 08.00-10.00 WIB, Tempat: Ruang Sidang II.

TIM MUNAQSAH

Ketua Sidang : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Azzahra Syah, S.Ag., M.Ag.

170009011997031002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-A’raf : 56)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005),h. 212

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Ayahanda Endang Maramis dan Ibunda Tresiawati, S.pd,SD, yang selalu berdo'a, mendidikku, memberi cinta dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti untukku.
2. Adikku tercinta Adi Setiawan, terimakasih atas dukungan serta pemberian semangat dalam menuntut ilmu semoga kau kelak dapat membanggakan orang tua.
3. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.
4. Sahabat-sahabat ku Rendy Yusa Ambara, Anton KM, Faisal Abda'oe, Yan Patmawi Syakban, Anjeli Adelia F.Z, Fitria Wulandari, Virgi Ernanda terimakasih untuk empat tahun lamanya kita yang saling menguatkan, tanpamu aku bukan siapa-siapa yang tak kan jadi apa-apa.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Teguh Hermawan, lahir pada tanggal 03 Juni 1996 di Talangpadang, anak pertama dari Bapak Endang Maramis dan Ibu Tresiawati, S.pd,SD.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis :

1. SDN 3 Talangpadang selesai pada tahun 2008.
2. SMPN 1 Talangpadang selesai pada tahun 2011.
3. SMAN 1 Talangpadang selesai pada tahun 2014.
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Fakultas Syariah.



Teguh Hermawan
NPM.142102227

KATA PENGANTAR

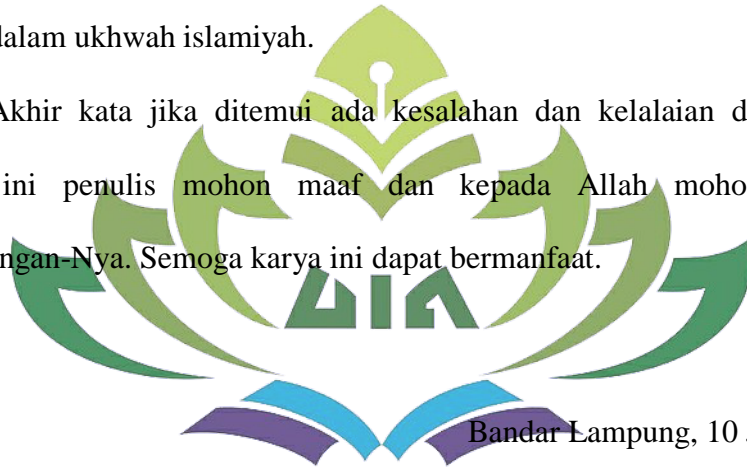
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeeri Raden Intan Lampung.
3. Dra. Firdaweri, M.H.I selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Eti Karini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Teruntuk teman-teman sekelas dan seperjuangan Siyash Syar'iyyah B terimakasih telah banyak memberi bumbunya dalam penelitian ini.
7. Teman-teman Kost Hillal para pria tangguh Bakti, Deden, Guntur, Agus, Arfan. Teman ngopi dan bertukar cerita tentang perjalanan hidup dan berhayal masa depan.
8. PT GRAB terimakasih telah memberikan penghasilan sampingan di sela-sela penyelesaian penelitian ini.
9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu kalian berikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam ukhwah islamiyah.

Akhir kata jika ditemui ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.



Bandar Lampung, 10 Juni 2018

Teguh Hermawan
NPM.1421020227

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	16
B. Pemerintah Daerah dalam Fiqh Siyasah	20
1. Pengertian Pemerintah Daerah	20
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	22
C. Pencemaran Udara dan jenis pencemaran udara	25
1. Pengertian Pencemaran Udara	25
2. Jenis Pencemaran Udara.....	27
D. Pengendalian Pencemaran Udara	29
1. Pengertian Pengendalian Pencemaran Udara.....	29
2. Pengaturan secara Umum.....	30
3. Pengaturan Secara Khusus	32
4. Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan.....	34
5. Instrumen Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	42
6. Instrumen Pemulihan Pencemaran Lingkungan.....	43
7. Syariat Islam terhadap Pencemaran dan	

Perusakan Lingkungan.....	44
---------------------------	----

BAB III UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Gambaran Umum Kecamatan Ulubelu.....	46
B. Gambaran Umum Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.....	47
C. Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.....	50
D. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dalam Pengendalian Pencemaran Udara.....	51
E. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dalam Pengendalian Pencemaran Udara.....	64

BAB IV ANALISIS TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Analisis Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Pencemaran Udara	69
B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran udara.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Pembimbing
2. Lampiran 2 : Surat Kesbangpol Provinsi
3. Lampiran 3 : Surat Kesbangpol Daerah
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
5. Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
6. Lampiran 6 : Surat keterangan wawancara



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah **Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Fiqh Siyasah

Tinjauan adalah “hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)”.¹

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 590.

² Munawir sjadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3.

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Fiqh Siyasah adalah pandangan hukum Islam terhadap peraturan kehidupan manusia dalam bernegara.

2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.³

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah oleh DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.⁴

Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara⁵

Pencemaran udara adalah masuknya atau di masukinnya zat, energi atau komponen lain kedalam udara oleh ambien kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.⁶

Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia

³ <https://kbbi.web.id/upaya> , Di akses pada tanggal 21, Februari 2018, Jam 14. 20.

⁴ Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pasal 1 (Ayat 2).

⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara , pasal 1 ayat (2).

⁶ *Ibid*, pasal 1 ayat (1).

yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur makhluk hidup lain nya.⁷

Jadi yang dimaksud dengan Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara agar udara bebas di yang ada dipermukaan bumi agar tetap terjaga nya kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur makhluk hidup lain nya.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi antara lain:

1. Upaya pengendalian menurut Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara mencakup sebagai berikut :

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan operasional pengendalian udara di daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (1), daerah menyusun dan menetapkan program kerja daerah di bidang pengendalian pencemaran udara. Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran

⁷ *Ibid*

udara di daerah sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab.⁸

Berdasarkan peraturan pemerintah di atas penulis ingin mengetahui apakah pemerintah kab. Tanggamus sudah melakukan aturan tersebut dan sudah sejauh mana upaya yang di lakukan.

2. Bahasanya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah wahana keilmuan bagi penulis pada umumnya, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena banyak *litelatur* yang berkaitan dengan proposal ini sehingga pembahasannya sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.
3. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

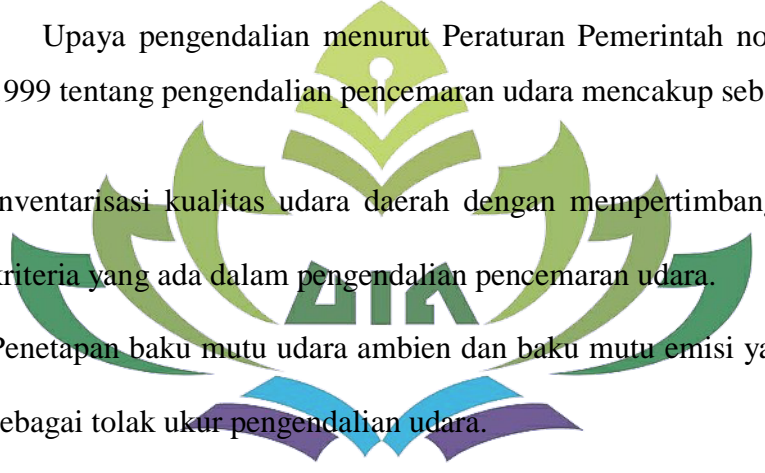
Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

⁸ *Ibid*, pasal 19 ayat (1) dan (2).

prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara. Udara dimana didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.⁹

Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.¹⁰

Upaya pengendalian menurut Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara mencakup sebagai berikut :

- 
- a) Inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara.
 - b) Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolak ukur pengendalian udara.
 - c) Penetapan mutu kualitas udara suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara.
 - d) Pemantauan kualitas udara baik embien dan emisi yang di ikuti evaluasi dan analisis.
 - e) Pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran udara.
 - f) Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara.

⁹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara,, pasal 1 ayat (2).

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran udara pencegahan dan penanggulangan pencemaran pengendalian pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.¹¹ Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di daerah di lakukan oleh bupati/walikota kepala daerah tingkat II.¹²

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Kajian Fiqh Siyasah adalah berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Salah satu lembaga negara yang pernah ada dalam negara Islam adalah lembaga *hisbah*. Menurut al-mawardi, hisbah merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan perkara baik, “ketika yang baik itu sudah mulai ditinggalkan orang dan yang mungkar sudah mulai dikerjakan orang”.¹⁴

Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 104:

¹¹ *Ibid*, pasal 16.

¹² *Ibid*, pasal 18 ayat (1).

¹³ Sarman dan M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105.

¹⁴ Al-mawardi, *al-ahkam*. (Qisti Press), h. 240.

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah diantar kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan merreaka itulah orang yang beruntung”.*¹⁵

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahat bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengarkan aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.¹⁶

Kegiatan pemanfaatan panas bumi di Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar karena mayoritas penduduk

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan nya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2005), h. 79.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasa* , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 241.

setempat merupakan petani kopi dan juga sayuran. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan lahan pertanian. Bahkan juga menyebabkan habitat hewan di sekitaran Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) terganggu pasalnya pada sebelum ada nya Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) masih banyak terlihat hewan-hewan di perkebunan warga tersebut seperti babi hutan yang masih sering dijumpai warga saat berkebun, hilangnya habitat hewan tersebut di tandai dengan sudah tidak adanya lagi tanaman warga di perkebunan tersebut yang di rusak oleh babi hutan tersebut, karena biasanya tanaman warga sering di rusak oleh babi hutan yang masuk dalam perkebunan warga sekitar.

Dalam uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk di kaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang masalah di atas maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah kabupaten Tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Pencemaran Udara?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka Tujuan dan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam mengendalikan pencemaran udara.
- b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan penelitian

Ada 2 kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis. Untuk lebih jelas nya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan implementasi peran pemerintah daerah kabupataen Tanggamus tentang pengendalian pencemaran udara. Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

- b. Kegunaan Praktis yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁷ Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptifanalitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai

¹⁷ *Ibid*, h. 32.

¹⁸ Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 119.

fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.¹⁹

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran pemerintah daerah menurut peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, di kabupaten Tanggamus (dalam kajian Fiqh Siyasah).

2. Responden

Responden adalah semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan yang diperlukan oleh pencari data. Bagi seorang peneliti, proses pengumpulan data dari responden melalui wawancara harus teliti. Kemampuan responden sedikit banyak mempengaruhi jawaban tau informasi yang diberikan. Adapun responden dalam penelitian ini, Kasubag Perencanaan, Kasi Pengaduan & Penegakan Hukum, Kasi pemeliharaan Lingkungan Hidup & Pengelolaan Hutan, Kabid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup, Kasi Perencanaan & Kerusakan Lingkungan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan

¹⁹ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jakarta: Pradigma, 2005), h. 58

sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dalam menetapkan peran Pemerintah daerah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, di kabupaten Tanggamus (dalam kajian Fiqh Siyasah).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan *research* yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data-data yang bersumber data,²¹ Daerah Kabupaten Tanggamus serta mengamati faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Tinjauan Fiqh siyasah terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

b. Metode interview

Metode Interview yaitu Proses memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

²⁰ . Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.

²¹ Soeratno, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: UUPAMP YKPN 1995), h. 99.

Ada tiga cara untuk melakukan interview yaitu:

- 1) Melalui percakapan informal (interview bebas)
- 2) Menggunakan pedoman wawancara
- 3) Menggunakan pedoman buku²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Interview bebas dan Interview menggunakan pedoman wawancara.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya²³. Metode dokumentasi penulis melakukan pengambilan data tentang aktivitas terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Pencemaran Udara.

5. Metode pengolahan data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Sistematising*

Sistematising adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.58-59.

²³ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM 2014), h. 41-43.

b. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian lapangan ataupun dari *literatur*.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Pencemaran Udara (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu). Kemudian dikaji dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berfikir yang digunakan secara deduktif, dari suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat didalam penelitian.

²⁴ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, (PT Grafindo Persada 2010), h. 56.

BAB II

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”.²⁵ Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).²⁶

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta:Pranamedia Group 2014),h. 2

²⁶ *Ibid* h.3

Berdasarkan penegrtian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqh Siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalam nya dalam sehubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermsayarakat.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mngetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan nya, bahasa dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, *Hasbi Ash Shiddieqy* mengungkapkan bahwa bahasanya ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, dan traktat.

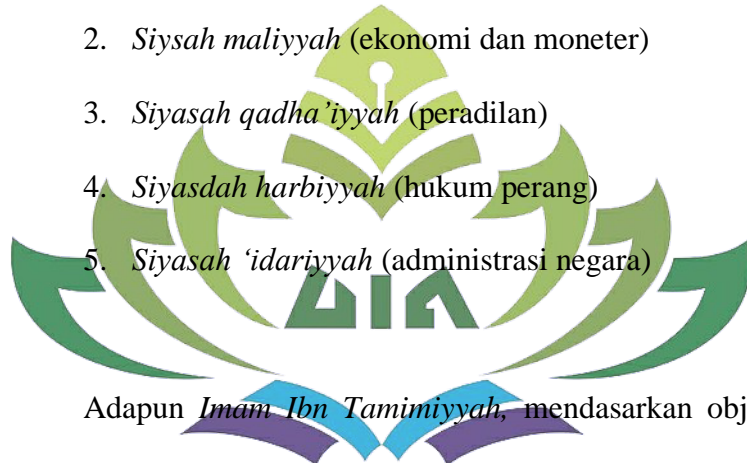
Objek *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dan non Islam ataupun pengatyran-pengaturan lain yang dianggap penting oleh

sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah.

Menurut *Imam al-Mawardi*, yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah-nya*, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:²⁷

1. *Siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
3. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
4. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
5. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)



Adapun *Imam Ibn Tamimiyyah*, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁸

²⁷ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 4; Muhammada Iqbal, *Fiqh Siyassah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.13

²⁸ Departemen Agama Ri, *Op.Cit.* h. 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁹

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah.³⁰ Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

1. *siyasah qadha'iyyah* (peradilan)
2. *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
3. *siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
4. *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

²⁹ *Ibid.* h. 87.

³⁰ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat, dar Al-Kutub al Arabiyat*, Beirut, 1996, h. 4.

Sementara *Abdul Wahhab Khalaf* berpendapat bahwa *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.³¹ Dan *Andul Wahhab Khallaf* mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:³²

1. *Siyasah Qadla'iyah*
2. *Siyasah Dauliyyah*
3. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, *Hasby Ashiddieqy* menyatakan bahwa onjek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa *syari'ah* yang tidak bisa diperoleh dalilnya yang merupakan *syariah* amah yang tetap.³³ dan *Hasby* membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:³⁴

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasyri'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
3. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijakan peradilan)

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al- Syar'iyat*, Dar al-Anshor, Qahirat, 1997, h. 5.

³² *Ibid.* h. 67.

³³ Hasby Ash Shiddieqy, pengantar *Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah), h. 28.

³⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 30.

4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah 'idariyyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (poliyik pelaksanaan undang-undang)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang ini mengacu terhadap nilai konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.³⁵

B. Pemerintah Daerah dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Persepektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, h. 46-47

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.³⁶ Dengan kata lain Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai sumber penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan demikian peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara dan tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagai daerah otonom. Selanjutnya yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik, dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap kamu yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” ataupun yang lain nya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk

³⁶ Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pasal 1 (Ayat 2).

orang dengan fungsinya. Dalam hal ini pengertian pemerintah daerah menurut Fiqh Siyasah termasuk dalam “*wullat*”.

Wullat (pemimpin daerah tingkat I dan II) atau bisa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang di angkat oleh imam untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu serta mejadi pimpinan di daerah tersebut. Adapun negeri yang dipimpin oleh imam Islamiyah bisa diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian itu disebut wilayah (setingkat provinsi). Setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dimana masing-masing bagian itu disebut ‘imalah (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin wilayah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin ‘imalah disebut ‘amil atau hakim.

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut pasal 65 UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah hal ini yang di maksud adalah kepala daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- f. Dihapus
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Daerah berwenang :

- a. Mengajukan rancangan perda.
- b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- c. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah.
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
- e. Melaksanankan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dalam kajian Fiqh Siyasah, maka persoalan tentang pemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan *siyasah*

dusturiyah, karena *siyasah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat nya.

Kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:³⁷

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintah Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang di keluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan di pertahan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

³⁷ *Op.Cit*, h. 187.

C. Pencemaran Udara dan Jenis Pencemaran Udara

1. Pengertian Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.³⁸

Bumi yang satu-satunya ini, telah diciptakan oleh Allah SWT dengan kekuasaan-Nya, dan diserahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Bagaimanapun dan apapun keadaan isi bumi yang jelas tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh

³⁸ Muklis, *Hukum Administrasi Lingkungan*, (jakarta: Setara Press, 2009), h. 12

Allah SWT dengan sia-sia, asalkan dikelola dengan baik dan penuh keimanan untuk kebaikan manusia, tanpa itu semua hanya kerusakan yang akan menimpa dunia ini. Oleh karena itu, maka hendaknya diusahakan agar jangan sampai bumi yang satu-satunya ini rusak ditangan manusia.³⁹

Sehubungan dengan hal di atas tersebut maka kehadiran manusia di muka bumi ini adalah untuk memenuhi Amanah Allah SWT. Dalam rangkaian surat Al-Quran banyak tersimpan bahwa petunjuk amanah Allah SWT itu mencakup kewajiban dan tanggung jawab sesama manusia dan juga terhadap alam sekitar.

Allah SWT menghendaki agar manusia dalam hidup di dunia ini haruslah menegakkan hidup yang berimbang antara hidup ukhrawi dengan hidup duniawi. Pedoman keseimbangan ini juga digariskan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadis, dimana dikemukakan bahwa *“beramalah wahai manusia untuk kepentingan hidup di dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan ibadahlah wahai manusia seolah-olah kamu akan mati besok pagi”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Syariat Islam menghendaki agar manusia memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab sehingga jangan sampai Alam ini dirusak atau mengalami kerusakan akibat ulah manusia itu sendiri.

³⁹ Abdul Manan, “Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Persepektif Hukum Islam” (Jakarta, 2015), h.231

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini haruslah mempergunakan alam ini secara bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Diantara ketentuan Allah SWT dalam memanfaatkan alam ini adalah :⁴⁰

- a. Jangan berbuat kerusakan atau bencana terhadap bumi, tanam-tanaman, dan keturunan (QS. Al-baqarah ayat 125)
- b. Jangan mudaratkan diri sendiri maupun orang lain (HR. Bukhari dan Muslim)
- c. Jangan memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan yang tidak halal (QS. Al-baqarah ayat 168)

2. Jenis Pencemaran Udara

Menurut sunu (tahun 2001) ada beberapa pencemaran jenis udara yaitu:

- a. Berdasarkan Tempat
 - 1) Pencemaran udara dalam ruang (indoor air pollution) yang disebut juga dengan udara tidak bebas seperti di rumah, bioskop, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lain nya. Biasanya zat pencemarnya adalah asap rokok. Asap yang terjadi di dapur tradisional ketika memasak dan lain sebagainya.

⁴⁰ *Ibid.*

2) Pencemaran udara luar ruang (outdoor air pollution) yang disebut juga udara bebas seperti asap-asap dari industri maupun kendaraan bermotor.

b. Berdasarkan gangguan atau efeknya terhadap kesehatan

1) Irritansia, adalah zat pencemar yang dapat menimbulkan iritasi jaringan tubuh seperti SO_2 , Ozon, dan Nitrogen Oksida.

2) Aspeksia, adalah keadaan dimana darah kekurangan oksigen dan tidak mampu melepas karbon oksida. Gas penyebab tersebut CO , H_2S , NH_3 , dan CH_4 .

3) Anestesia, adalah zat yang mempunyai efek membius dan biasanya merupakan pencemaran udara dalam ruang. Contohnya: Formaldehyde, Alkohol.

4) Tokis, adalah zat pencemar yang menyebabkan keracunan. Zat penyebabnya seperti timbal, Cadmium, Fluor, Insektisida.

c. Berdasarkan susunan Kimia

1) Anorganik adalah zat pencemar yang tidak mengandung karbon seperti asbestos, ammonia, asam sulfat dan lain-lain.

2) Organik adalah zat pencemar yang mengandung karbon seperti pestisida.

d. Berdasarkan asalnya

- 1) Primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Contohnya: CO_2 , yang meningkat di atas konsentrasi normal.
- 2) Sekunder adalah senyawa kimia yang berbahaya yang timbul dari hasil reaksi antara zat polutan primer dengan komponen alamiah. Contohnya: *Peroxy Acetil Nitrat* (PAN).

D. Pengendalian Pencemaran Udara

1. Pengertian pengendalian pencemaran udara

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II dapat melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian pencemaran udara dan/atau gangguan dari sumber tidak bergerak yang dilakukan oleh penggung jawab usaha/dan atau kegiatan dibebankan kepada penggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Setiap orang atau pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihan nya.

2. Pengaturan Secara Umum

Peraturan pengendalian pencemaran udara yang bersifat superfisial, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun berbentuk peraturan pemerintah daerah. Biasanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan ini sangat umum dan tidak secara rinci memuat ketentuan pengendalian pencemaran udara. Diantaranya adalah sebagai berikut:

41

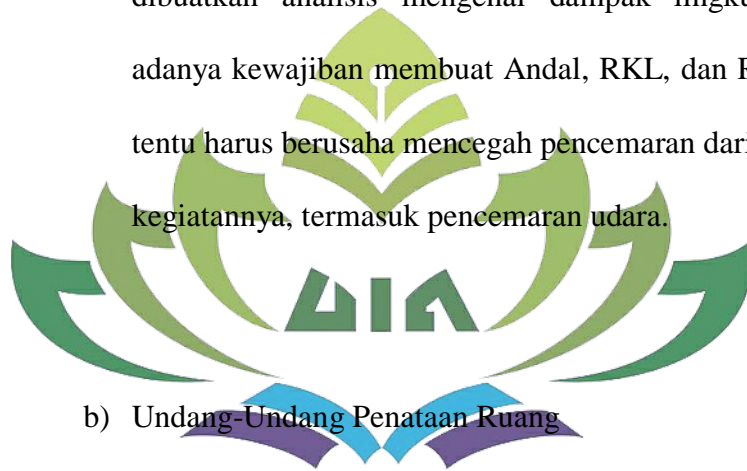
a) UUPPLH (Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup)

UUPPLH merupakan Undang-Undang kerangka kerja (*framework law*) untuk melindungi lingkungan dan tidak secara khusus mengatur tentang pencegahan pencemaran udara. Akan tetapi, dasar hukum yang melarang orang dan/atau badan hukum mencemari lingkungan termasuk udara, dapat ditemukan dalam sejumlah pasal. Misalnya pasal 6 ayat (1)

⁴¹ Sukadan Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, termasuk pencemaran udara tentunya.

Dasar lain yang dapat dipakai adalah pasal 15 ayat (1), yang mengharuskan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan. Dengan adanya kewajiban membuat Andal, RKL, dan RPL, pengusaha tentu harus berusaha mencegah pencemaran dari usaha dan/atau kegiatannya, termasuk pencemaran udara.



b) Undang-Undang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak secara langsung terkait dengan pencegahan dan pengelolaan pencemaran udara. Karena Undang-Undang ini mengatur tentang tata ruang, maka digunakan untuk mencegah pencemaran melalui penataan ruang. Tujuan pengelolaan penataan ruang yaitu, yaitu *pertama*, pelaksanaan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan berdasarkan asas wawasan nusantara dan ketahanan nasional. *Kedua*, pelaksanaan pemanfaatan ruang

berdasarkan hukum di kawasan peerlindungan dan kawasan pertanian.

c) Undang-Undang Perindustrian

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan produk hukum, yang berusaha menciptakan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Walaupun Undang-Undang ini tidak secara khusus mengatur tentang pencemaran, dia menjadi landasan bagi pemerontah untuk membuat kebijaksanaan dan hukum untuk mencegah dampak yang potensial terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan akibat kegiatan perindustrian.

3. Pengaturan Secara Khusus

Pengaturan secara khusus maksudnya adalah pengaturan pengendalian pencemaran udara yang ditemukan dalam peratryan perundang-undangan yang secara detail mengatur tata cara pengendalian mutu udara. Diantaranya sebagai berikut:

a) Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 dikeluarkan pada 26 Mei 1999. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mencegah, membatasi dan memitigasi pencemaran udara

termasuk gangguan dan kebisingan, baik dari sumber tidak bergerak maupun sumber bergerak. Peraturan Pemerintah ini menggunakan dua bentuk instrument hukum untuk mencegah, mengontrol pencemaran udara, yaitu Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi.

b) Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 memuat ketentuan larangan, ketentuan kewajiban atau perintah dan ketentuan tentang hak. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dapat dibedakan juga atas terhadap siapa norma itu diarahkan, yaitu orang, pengusaha dan instansi pemerintah.⁴²

1) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak


Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:
Kep-13/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak Bergerak dirancang untuk
mengimplemetasikan Baku Mutu Udara Ambien
Nasional.

⁴² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 147.

4. Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan

a) KLHS

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 10 UUPPLH adalah “rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.



Diberlakukannya KLHS membuktikan bahwa instrumen-instrumen yang sebelumnya ada tidak mampu mencegah dan mengatasi timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup. Instrumen-instrumen yang ada sebelum KLHS pada pokoknya berorientasi kegiatan individual, misalkan Amdal dan Izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembuatan KLHS di tujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan

program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain Amdal, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, dan/atau program. Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

b) Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pengertian Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energy, atau komponen yang lain atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya

dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku Mutu Lingkungan Hidup merupakan instrument untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan.

Baku mutu lingkungan ini berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain. Fungsi Baku Mutu Lingkungan adalah untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar dan untuk mengetahui telah terjadi kerusakan atau pencemaran hidup lingkungan. Nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tampung dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi, mutu lingkungan. Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan.⁴³

c) AMDAL

⁴³ *Ibid*, h. 91.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁴⁴ Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu, atau kegiatan dalam kawasan.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 Tentang AMDAL, pasal 1 ayat (2).

d) Izin Lingkungan

Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum administrasi.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁴⁵ Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi : penyusunan AMDAL dan UKL/UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL, permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, pasal 1.

e) Audit Lingkungan

Di Indonesia, penerapan audit lingkungan mula-mula diatur dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: Kep-42/MenLH/11/94 tentang pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan (seterusnya disingkat dengan Kep Men LH No. 42/11/94). Berdasarkan Kep Men LH No. 42/11/94 pemberlakuan audit bersifat sukarela. Audit Lingkungan menurut Kep Men LH No. 42/11/94 adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pengkajian penataan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Di Indonesia pasal 28 dan 29 UUPPLH, hanya audit lingkungan wajib yang berfungsi sebagai instrumen (tool) bagi *Command and Control Approach*. *Command and Control Approach* atau Pendekatan Atur dan Awasi adalah salah satu pendekatan perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien. *CAC (Command and Control)* menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup.

f) Analisis Risiko Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 47 ayat (1) UUPPLH menyatakan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan analisis risiko lingkungan meliputi : (a) pengkajian risiko, (b) pengelolaan risiko dan komunikasi risiko, jika dilihat dari pengertiannya, analisis risiko lingkungan fungsinya sangat mendekati fungsi dari Amdal. Jika Amdal pada dasarnya kajian terhadap peristiwa yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan. Bidang yang saat ini telah menggunakan analisis risiko lingkungan adalah pelepasan dan peredaran Produk Rekayasa Genetik. Pelepasan dan peredaran Produk Rekayasa Genetik menimbulkan risiko terhadap keamanan lingkungan telah diatur dalam PP No. 21 Tahun 2005.

g) Pengawasan Penataan (*Monitoring Compliance*)

Pengawasan Penataan (*Monitoring Compliance*) merupakan faktor yang sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum lingkungan materil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup. Di Amerika Serikat, ada

empat bentuk pengawasan pemantauan (*Monitoring Compliance*) yang tersedia yaitu:

- 1) Inspeksi yang dilakukan oleh inspektur lingkungan;
- 2) Pengawasan sendiri (*self monitoring*), termasuk pencatatan sendiri (*self-recording*) dan pelaporan sendiri (*self-reporting*) oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha;
- 3) Pengaduan masyarakat (*citizen complaints*);
- 4) Pemantauan kondisi lingkungan dikawasan sekitar fasilitas kegiatan

UUPPLH baru mengatur pengawasan penataan yang minimum karena Undang-Undang ini hanya menonjolkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat administratif, seperti yang tertuang dalam pasal 22 dan 23. Menurut pasal 22, pengawasan penataan lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian pasal 23 memandatkan tugas pengawasan kepada lembaga pengendalian dampak lingkungan yang dalam hal ini adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk dengan keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990, yang kemudian diamendir dengan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994 dan Keputusan Presiden No. 196 Tahun 1998.

Tugas pejabat pengawasan penataan diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUPPLH. Pasal ini memberi kewenangan kepada pejabat pengawas untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, mebuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan. Sekalipun UUPPLH hanya mengatur pengawasan penataan minimum, ini tidak berarti bahwa sistem pengawasan di Indonesia hanya berbentuk inspeksi. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mengharuskan pemilik kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan *self-monitoring*, *self recording*, *self reporting*, dan pengawasan disekitar fasilitas kegiatan dan/atau usaha.

5. Instrumen Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup

a) Pemberian Informasi

Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat, baik melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak pencemaran tersebut diketahui.

b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan

Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :

- 1) Evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber pencemaran lingkungan lingkungan hidup.
- 2) Penggunaan alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- 3) Identifikasi dan penetapan daerah berbahaya
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, Bupati/walikota.

6. Instrumen Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup

a) Penghentian sumber pencemaran

Penghentian sumber pencemaran sebagaimana dimaksud adalah :

- 1) Penghentian proses produksi
- 2) Penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran
- 3) Tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

b) Remediasi

Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk menaikkan mutu lingkungan hidup.

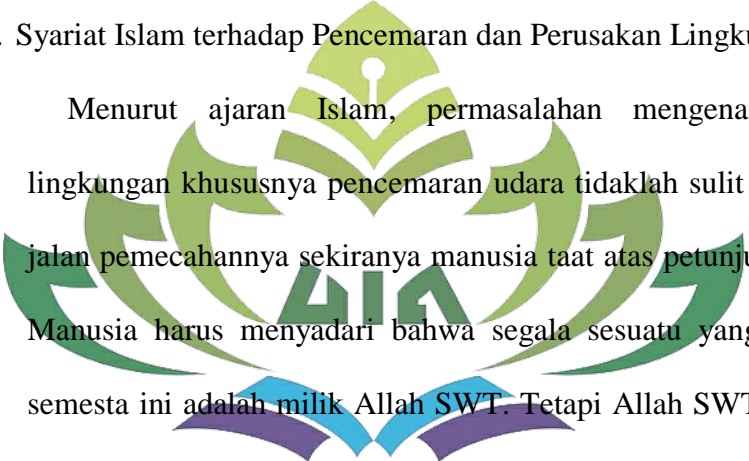
c) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memperbaiki perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

d) Restorasi

Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

7. Syariat Islam terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan



Menurut ajaran Islam, permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT. Manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Tetapi Allah SWT dengan kasih sayangnya telah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya dan mengolah sumbernya untuk kemakmuran manusia. Sebagai makhluk hidup yang memperoleh hak menggunakan alam ini, manusia haruslah mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemiliknya, manusia tidak berhak memanfaatkan dan menggunakan alam ini secara sembarangan dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.⁴⁶

⁴⁶ *Op.Cit.* h.232.

Kewajiban seorang warga negara terhadap negara sangatlah erat hubungan nya warga negara dengan pemerintah. Inti dari kewajiban ini adalah bahwa seorang warga negara harus taat dan patuh kepada pemimpin nya, selama pemimpin itu patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.



BAB III

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Gambaran Umum Kecamatan Ulubelu

Desa Muara Dua merupakan wilayah penelitian yang berada di Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan luas wilayah 3.600 ha. Adapun batas administrasi wilayah meliputi :

1. Sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung register 32
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngarip
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Penantian

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kecamatan Ulubelu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu masih terdapat beberapa sumber daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan antara lain; pertambangan emas, bahan galian seperti granit dan batu pualam atau marmer. Disamping itu juga terdapat pemandian air panas dan panas bumi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pembangkit energi alternatif.

Hasil pengamatan petrografis beberapa sayatan tipis dari core UBL-01 menunjukkan adanya batuan-batuan teralterasi dengan intensitas kuat dan vein-vein mineral hidrotermal yang memotong batuan (Yorinaldi, 2000). Zona-zona permeabel yang menyebabkan harga pengukuran gravitasi di daerah ini rendah dibandingkan daerah sekelilingnya, jadi

anomali bernilai rendah tersebut mungkin disebabkan oleh banyaknya rekahan-rekahan yang merupakan salah satu faktor penting pada sistem panas bumi di daerah Ulubelu ini.⁴⁷

B. Gambaran Umum Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Organisasi publik karena akan menjelaskan bagaimana kedudukan, fungsi di dalam organisasi.

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Bupati Tanggamus No. 46 Tahun 2016, yaitu terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbag Perencanaan ;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian ;
 3. Subbag Keuangan ;
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) membawahi ;
 1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan ;

⁴⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ulubelu,_Tanggamus, Di akses pada tanggal 21, Juli 2018, Jam 14. 20.

2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum ;

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas membawahi :

1. Seksi pengelolaan sampah dan limbah B3
2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :

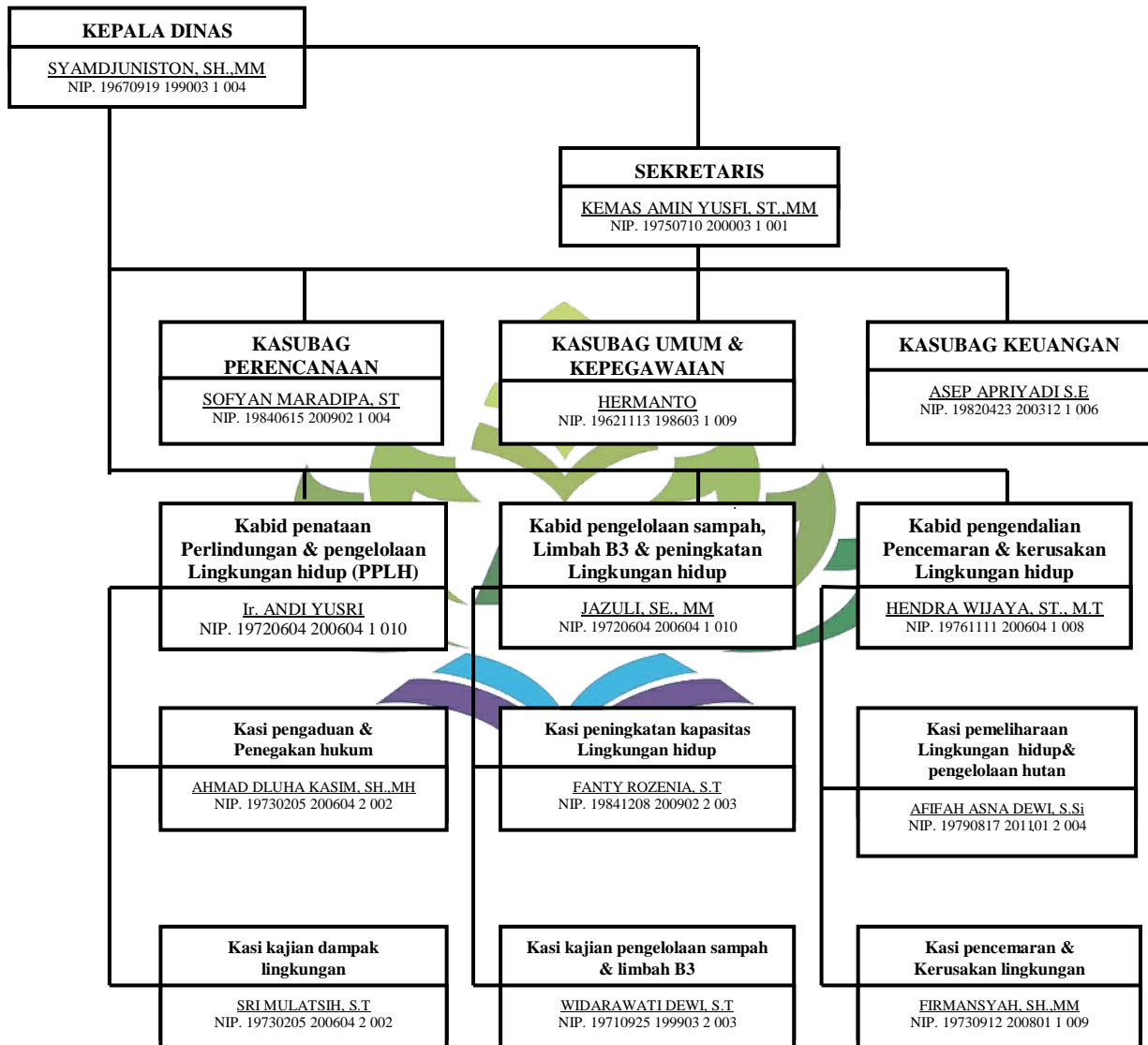
1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan ;

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS



Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup

C. Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

Perangkat daerah merupakan jalannya pemerintahan yang ada di daerah itu sendiri. Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Tanggamus yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Tugas pokok

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu urusan wajib dan urusan pilihan dalam bidang lingkungan hidup.⁴⁸

2. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup

⁴⁸ Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, Pasal 2.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus No. 46 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

D. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Untuk pengendalian pencemaran udara di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) ulubelu pemrintah daerah kabupaten Tanggamus melakukan pengendalian yaitu :

1. Pemantauan kualitas udara ambien

Dalam pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus melakukan pemantauan dengan menggunakan metode *passive sampler*. *Passive sampler* merupakan peralatan untuk sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dari udara ambien. Prinsip kerjanya tidak membutuhkan power listrik karena bersifat pasif dimana alat ini berbentuk bulat dan didalamnya terdapat kemas filter yang sudah diberi cairan khusus dari bahan kimia yang fungsinya untuk menangkap gas yang ada di udara sekeliling. Setelah sampling kemudian *passive sampler* tersebut dianalisa di laboratorium udara (LAPAN 2015).

Menurut LAPAN kriteria lokasi pemilihan sampling sebagai berikut :⁴⁹

- a. Letakkan peralatan di daerah dengan gunung/bangunan yang rendah dan saling berjauhan
- b. Secara umum, tidak boleh ditempatkan disekitar sumber daya alam : gunung berapi, sumber air panas, emisi geotermal, peternakan dan aktivitas pertanian.
- c. Sampling tidak boleh dilakukan di area puncak pegunungan yang berhubungan dengan efek angin lokal, serta di area

⁴⁹ Lapan, *Teknik Pemantauan Deposisi Kering dengan Passive Sampler dan Analisanya*, (Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Lembaga Penerbangan dan Antariksa, 2015)

lenbah dan cekungan yang menjadi tempat pembentukan udara stagnan.

- d. Apabila pemantaun bersifat kontiniu, maka pemilihan loaksi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pasa masa datang.

Metode ini metode alternatif berbiaya rendah. Pemantauan ini memerlukan durasi panjang, minimal 1 (satu) minggu. Metode ini digunakan di Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Jepang dan banyak negara lain untuk mendapatkan data trend tahunan pada titik-titik pantau yang tersebar untuk mempresentasikan variasu spesial diwilayah yang luas.

Metode ini merupakan metode yang ekonomis dan dapat dilakukan di banyak tempat. Jika menggunakan biaya yang sama untuk manual aktif pada satu titik/lokasi, dengan metode pasif dapat dilakukan pengukuran di 10-12 titik.

Metode ini membutuhkan perhitungan akurasi dan persis, atau menimal presisi yang menandakan status kontrol kualitas laboratorium. Namun, saat ini belum banyak laboratorium yang dapat melakukannya dan di Indonesia belum ada panduan untuk montrol kualitas dari data yang dihasilkan dengan pengukuran pasif.

Alat dan Bahan

No	Alat dan Bahan	Fungsi
1	<i>Passive Sampler</i>	Untuk pemantauan kualitas udara ambien
2	Tabung <i>Passive Sampler</i>	Sebagai tempat menyimpan <i>Passive Sampler</i> sebelum dan sesudah melakukan sampling
3	Sangkar <i>Passive Sampler</i>	Sebagai tempat untuk menyimpan <i>Passive Sampler</i> sebelum dan sesudah melakukan sampling.
4	Plastik press	Sebagai tempat untuk menyimpan botol
5	Perlengkapan surat perintah jalan dan surat pemantauan	Sebagai bukti telah melakukan pemantauan kualitas udara
6	Kawat	Untuk menyangkutkan <i>Passive Sampler</i>
7	Tang	Untuk memotong kawat yang menyangkutkan <i>Passive Sampler</i>
8	Label	Untuk memberi tanda pada <i>Passive Sampler</i>
9	Kamera	Untuk memfoto kegiatan pemantauan


Metode pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara meliputi seluruh kegiatan pemasangan *passive sampler* dan pengambilan *passive sampler* yang menyangkut proses pengelolaan *composting* dan aspek teknis lapangan. Kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang dilakukan serta berdasarkan jadwal rencana pemasangan dan pengambilan *passive sampler*. Pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus menggunakan alat *Passive Sampler*, alat ini dipasang dikawasan perkantoran, transportasi, perindustrian, pemukiman karena ditempat ini banyak aktivitas masyarakat yang menimbulkan dampak terhadap pencemaran udara,

alat ini dipasang secara tergantung, alat pemantauan udara ini dipasang selama 2 (dua) minggu setelah itu *Passive sampler* itu diambil dan dikirim labor LAPAN untuk dianalisa.

Data yang perlu dicatat dari pemasangan dan pengambilan sampel yaitu lokasi dan titik pengambilan sampel, tanggal dan waktu pemasangan dan pengambilan *Passive sampler*. Pelaksanaan kegiatan pemantauan mutu udara daibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Tahap I dilaksnakan pada bulan januari sampai dengan juni
- 2) Tahap II dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan desember

Hasil Pemantau Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Tanggamus tahun 2016 (bulan januari-desember 2016).



No	KABUPATEN	Kadar NO ₂ (µg/Nm ³)				Kadar SO ₂ (µg/Nm ³)				Kadar NO ₂ (µg/Nm ³)	Kadar SO ₂ (µg/Nm ³)
		A	B	C1	C2	A	B	C1	C2		
1	TANGGAMUS	4.43	2.88	1.36	1.46	12.11	9.07	2.79	12.48	2.53	9.11

Sumber: Data Tahunan Kualitas Udara di Kabupaten Tanggamus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.

Keterangan :

A = Transportasi

B = Industri

C1 = Pemukiman

C2 = Perkantoran

NO₂ = Nitrogen Dioksida

SO_2 = Sulfurdioksida

Adapun pemantauan kualitas udara dari tabel diatas kualitas udara di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu termasuk dalam kategori Industri (B).

Data diatas tersebut diambil dari pemantauan kualitas udara di Kabupaten Tanggamus tetapi diuji oleh kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH), sehingga penulis menggunakan data tahun 2016 dikarenakan data tahun 2017 belum di keluarkan oleh pihak kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH).

2. Pengawasan preventif dan refresif


a. Pengawasan preventif

1) Pengawasan rutin

Pengawasan ini biasanya sudah diprogramkan pada awal tahun dengan sasaran pengawasan telah ditentukan dan waktu/ frekuensinya juga telah ditetapkan. Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan setiap 1 tahun 2 (dua) kali, yaitu dimulai dari bulan januari-juni dan bulan juli-desember. Bentuk pengawasan ini dilakukan dengan melakukan kegiatan dengan mendatangi langsung ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) guna memeriksa mengenai izin lingkungan terkait pemeriksaan sampel nilai baku mutu udara. Dan menurut hasil

wawancara dengan Bapak Sofyan Maradipa, selaku Kasubag Perencanaan mengatakan bahwa pengawasan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) ulubelu terakhir dilakukan pada bulan juli 2018 lalu dan telah melakukan pengawasan yang ke 2 (dua) kali dalam tahun ini terkait Pengendalian Pencemaran Udara.⁵⁰

2) Pengawasan berdasarkan Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER)



Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) mempunyai fungsi pengawasan penataan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk pengawasan ini dimana apabila perusahaan ingin meningkatkan kualitas perusahaan menjadi lebih baik lagi dan/atau lebih tinggi, maka perusahaan melaporkan hal tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus untuk segera melakukan pengawsan ke perusahaan dalam memeriksa peningkatan kualitas perusahaan. Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) ulubelu telah mendapat PROPER biru pada tahun 2013, PROPER biru adalah usahan dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan

⁵⁰ Sofyan Maradipa, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kota Agung. 01 Agustus 2018.

utama PROPER adalah meningkatkan penataan dunia industri kepada *stakeholder* terkait antara lain: media masa, media elektronik, website dan lain-lain. Kriteria penilaian kinerja perusahaan secara umum meliputi:

- a) Pelaksanaan AMDAL, RKL/RPL, dan UKL/UPL;
- b) Pengendalian pencemaran air
- c) Pengendalian pencemaran udara
- d) Pengelolaan limbah padat non B3 dan limbah B3
- e) Pemanfaatan limbah dan sumber daya
- f) Sistem manajemen lingkungan; dan
- g) *Community development*

b. Pengawasan Represif

1) Pengawasan sewaktu-waktu

Pengawasan jenis ini dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan, serta berdasarkan laporan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 tahun. Bentuk pengawasan ini dilakukan apabila adanya pelanggaran lingkungan yang terjadi terkait pencemaran udara. Tidak hanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, tetapi apabila diperlukannya adanya pembinaan maka dilakukan pembinaan dengan

mengadakan sosialisasi ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu.

2) Pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat

Pengawasan ini dilakukan berdasarkan atas adanya pengaduan dari masyarakat terhadap adanya isu lingkungan yang terjadi. Untuk melihat kebenaran pengaduan maka perlu dilakukan verifikasi ke lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus. Dalam melakukan verifikasi sekaligus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dilapangan. Menurut bapak Ahmad Dluha Kasim, selaku kasi pengaduan dan penegakan hukum belum adanya pengaduan oleh masyarakat Desa Muara terkait adanya isu pencemaran yang mendatangi atau menemui langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.⁵¹

Berdasarkan keterangan diatas maka pengawasan terhadap pencemaran udara oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana kerja, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.⁵²

⁵¹ Ahmad Dluha Kasim, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kota Agung . 01 Agustus 2018.

⁵² Sujamto, *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1986), h. 85.

Pengawasan terhadap pencemaran udara dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu dimulai sejak perizinan itu dikeluarkan, sebagaimana diatur juga dalam pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyatakan bahwa:⁵³

1. Setiap penganggung jawab usaha atau kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan berupa pembuangan emisi dari peraturan Gubernur.
2. Permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
3. Izin lingkungan berupa pembuangan emisi berlaku selama kegiatan usaha berlangsung dan dievaluasi secara berkala.
4. Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin lingkungan berupa pembuangan emisi ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Selain pengawsan preventif, pemerintah daerah kabupaten Tanggamus melakukan pengawasan secara represif. Pengawasan refresif adalah Dapat pula dikatakan bahwa pengawsan refresif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.⁵⁴

⁵³ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencecamaran Udara.

⁵⁴ *Ibid., h. 87.*

Hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dluha Kasim selaku kasi pengaduan dan penegakan hukum bahwa hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus hanya sebatas pemantauan dan pengawasan yang apabila terjadi pelanggaran dan/atau pencemaran udara langsung diserahkan kepada pejabat PPNS LH/Polri. Dan berdasar hasil pengawasan di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu tingkat pencemaran di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu masih di anggap baik dalam mengelola lingkungan.

Standar pengawasan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus terhadap pencemaran udara oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu sudah dilakukan. Hal-hal yang diawasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dalam pencemaran udara yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga (PLTP) Ulubelu, yaitu mengawasi:

- a) Nilai baku mutu udara
- b) Fasilitas atau sarana prasarana dalam pemanfaatan panas bumi misalnya turbin dan alat-alat berat lain nya
- c) Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas atau bekerja melakukan kegiatan pemanfaatan panas bumi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium terdapat ketidaksesuaian Baku Mutu Lingkungan dan terjadi pencemaran udara karena kelalaian atau kesengajaan oleh perusahaan maka tindak lanjut berupa:

- 1) Apabila hanya sebatas ketidak sesuaian nilai baku mutu kualitas udara, maka tindak lanjut diberikan pembinaan untuk segera dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sebelumnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus diberikan surat teguran.
- 2) Apabila terjadi kasus yang berasal dari laporan masyarakat/pengaduan masyarakat dilakukan verifikasi lapangan ternyata terjadi pencemaran udara maka segera dilakukan penyidikan oleh pihak PPNS LH/Polri yang apabila terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan dari hasil penyidikan.

Menurut Ibu Afifah Asna Dewi, selaku kasi pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menambahkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara. Pelaksanaan pembinaan pengawasan oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap orang atau badan yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Pembinaan dan pendampingan terdiri dari:⁵⁵

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara dan ;
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udara.

Ibu Afifah Asna Dewi, mengatakan bahwa program-program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam kegiatan/usaha di Kabupaten Tanggamus, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga (PLTP) Ulubelu adalah :

- a) Melakukan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan bentuk pengawasan yaitu pemantauan kualitas mutu udara yang dilakukan saat sebelum, dan saat setelah kegiatan Uji kualitas mutu udara berlangsung
- b) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan badan usaha secara rutin termasuk di dalamnya pengawasan, pengendalian, penataan dan

⁵⁵ Afifah Asna Dewi, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kota Agung . 01 Agustus 2018.

pembinaan dengan bentuk pengawasan melakukan sosialisasi terhadap perusahaan dan masyarakat sekitar area kegiatan pemanfaatan panas bumi.

- c) Melakukan fungsi dan tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus itu sendiri di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

E. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Menurut Bapak Hendra Wijaya selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengendalian pencemaran udara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) ulubelu yaitu⁵⁶

1. Faktor Keuangan (*Financial*)

Keterbatasan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk menunjang pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus ini mengakibatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta program-program yang dilakukan berdasarkan skala prioritas kurang berjalan dengan baik. Untuk melakukan pengendalian terhadap

⁵⁶ Hendra Wijaya, wawancara dengan Penulis, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kota Agung. 01 Agustus 2018.

pencemaran udara di Kabupaten Tanggamus tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan nya, akan tetapi tetap dilakukan dengan sistem periode, yaitu setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali atau minimal 1 (satu) tahun sekali.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dalam melakukan pengendalian pencemaran udara khususnya di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulube Kabupaten Tanggamus kurang maksimal karena masih sangat tergantung pada ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Bapak Hendra Wijaya menambahkan bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus memiliki anggaran dana untuk melakukan pengawasan rutin itupun dananya terbatas. Sedangkan alokasi anggaran dana apabila terjadi pencemaran udara yang sifatnya insidensial, untuk saat ini belum ada anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Bapak Firmansyah sumber daya manusia khususnya dalam pengendalian pencemaran udara dilapangan dan petugas pemeriksaan masih terbatas, saat ini masih memiliki 3 (tiga) orang saja dalam tenaga pengawas dilapangan dan pemeriksa. Jumlah ini sangat kurang memadai dibandingkan dengan adanya jumlah PLTP yang ada dikabupaten tanggamus. Petugas dalam melakukan pengawasan

seharusnya minimal sekitar 10 (sepuluh) orang, dimana 4 (empat) orang untuk bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 3 (tiga) orang untuk sub bidang laboratorium dan AMDAL, dan 3 (tiga) orang untuk sub bidang bina lingkungan. Unsur keberhasilan pengendalian lingkungan adalah salah satunya yaitu sumber daya manusia dengan ditunjukkan pada peningkatan pengetahuan pengelolaan lingkungan, keterampilan teknik lingkungan, kematangan emosional dan spritual dalam pengambilan keputusan. Keberadaan petugas pengawasan lapangan ini sangat penting, karena berdasarkan hasil pengawsan dan pemeriksaan dari uji laboratuirium terhadap sampel di tempat usaha/kegiatan usaha, ini menjadi dasar untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus melaakukan tindakan lanjutan seperti pemebrian teguran secara tertulis maupun pemberian sanksi terhadap tempat usaha/kegiatan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan.

Pada saat ini, Dinas Lingkingan Hidup Kabupaten Tanggamus masih memiliki ketergantungan terhadap para teknisi laboratorium dan kepada petugas-petugas dari pemerintah Provinsi Lampung dalm melakukan pemeriksaan sample nilai baku tingkat pencemaran udara di Pembangkit Listrik Tenaga Panas. Dengan demikian tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus masih mengalami

kekurangan tenaga penyidik dibidang lingkungan hidup dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang.⁵⁷

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah faktor utama dalam menjalani pelaksanaan pengawas agar dapat berjalan secara optimal. Akan tetapi, saat ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus terhadap pencemaran udara ini terkendala yakni belum memadainya sarana dan prasarana yang pas dan sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus untuk menunjang kegiatan pengawasan yang utama adalah peralatan dan perlengkapan untuk mengoperasikan laboratorium. Menurut bapak Hendra Wijaya saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus memang telah memiliki laboratorium, akan tetapi belum dapat digunakan secara optimal karena peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penelitian belum tersedia. Untuk mengatasinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sampai saat ini bekerja sama dengan laboratorium milik pemerintah maupun swasta yang terakreditasi. Selain itu keadaan yang jauh memerlukan kendaraan untuk survey verifikasi lapangan yang dapat membawa peralatan dan perlengkapan pengujian dan alat-alat lain yang diperlukan

⁵⁷ Firmansyah, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kota Agung, 01 Agustus 2018.

untuk menunjang kegiatan pengawasan belum tersedia serta laporan hasil yang masih manual.



BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyebutkan bahwa penegndalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien. Pencegahan sumber pencemaran baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.⁵⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pelaksanaan operasional Pengendalian Pencemaran Udara di daerah dilakukan oleh Bupati/Walikota kepala daerah tingkat II.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah senantiasa dituntut untuk selalu memperhatikan keadaan udara dan kualitas udara di daerah, karena udara merupakan suatu sumber daya alam yang mempengaruhi manusia sebagai makhluk hidup lain nya perlu dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk memelihara kesehatan, kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lain nya. Tetapi pada kenyataan nya Pemerintah Daerah belum dapat mengoptimalkan penegendalian pencemaran udara di daerah karena faktor sarana dan prasarana yang

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

belum memadai untuk melakukan upaya pengendalian pencemaran udara serta masih tergantung pada kementrian dalam hal pengendalian ini, dan faktor keuangan pun menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian khususnya di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu karena jarak tempuh yang jauh dari pusat pemerintahan di Kabupaten Tanggamus.

Kinerja Pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara dituntut untuk selalu *profesional* dalam proses pengendalian karena apa yang dilakukan oleh mereka tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas dan makhluk hidup lain nya serta menimbulkan efek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keadaan lingkungan alam sekitarnya. Pencemaran udara merupakan suatu masalah yang sangat berbahaya apabila permasalahan itu terjadi karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menangani dan mampu melakukan pengendalian terhadap pencemaran udara itu sendiri demi terjaganya kelestarian lingkungan. Dengan demikian kesuksesan pengendalian pencemaran udara adalah kesuksesan pemerintah dalam melindungi masyarakat dan alam sekitar, namun fakta di daerah instansi yang bertanggung jawab atas pencemaran udara belum memiliki sarana dan prasana yang memadai dalam menunjang kegiatan pengendalian pencemaran udara. Demikian pula yang terjadi di Daerah

Kabupaten Tanggamus, upaya pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara belum dapat berjalan dengan maksimal.

B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadapn Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian pencemaran Udara

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara. Udara dimana didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.⁵⁹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, banyak sekali ayat-ayat Al-qur'an dan al-hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadi nya pencemaran lingkungan akibat polusi udara. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran

⁵⁹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur'an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al- A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*⁶⁰

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h. 212.

⁶¹ Ibnu Katsir, *Tafsir lengkap*, h. 31.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه الترميذی)

“Rasulullah SAW bersabda: barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa, barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangat luas dan lebih luas dari pada penduduk pada saat itu. Sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak dirawat tentunya tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya.

Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah dan juga memperkecil terjadi nya pencemaran lingkungan yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan semua penduduk.

Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari dari

kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkannya.⁶²

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasaian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lain nya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat islam.

⁶² Irwantoni, "peranan *Siyasah Syar'iyah* dalam Memahami nas-nas Agama". Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 3, (Bandar Lampug: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 270-271. (On-Line), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (9 Desember 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam pengendalian pencemaran di udara di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu sudah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran udara tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran udara, walaupun masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi *financial* (keuangan), prasarana maupun Sumber Daya Manusia.
2. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten tanggamus sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai *khalifah* di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. *Khalifah* dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lain nya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelsetarian lingkungan.

Pendapat penulis mengenai pencemaran udara yang dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu (PLTP) menimbulkan dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Dalam sisi positif Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu tersebut dapat menghasilkan listrik yang dimana listrik sendiri merupakan kebutuhan pokok dalam masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam sisi negatif yaitu udara disekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) mengalami pencemaran udara yang dimana lingkungan disekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) merupakan perkebunan warga sekitar. Walaupun demikian namun Pembangkit Listrik Tenaga panas (PLTP) Ulubelu lebih besar menghasilkan sisi positif dibandingkan dengan sisi negatifnya yang hanya merugikan hanya sebagian dari masyarakat saja masyarakat.

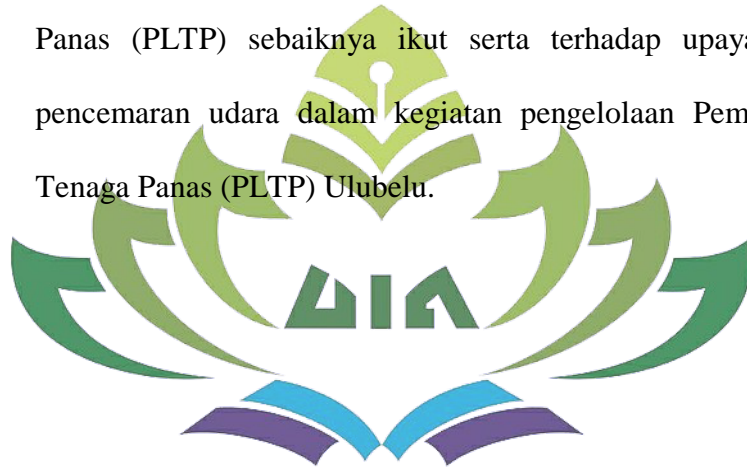
B. Saran

Dalam rangka meningkatka upaya pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus sebaiknya dapat memberikan sarana dan prasana serta tenaga ahli yang dapat menunjang kegiatan pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dalam rangka mencegah pencemran lingkungan khususnya pencemran udara

oleh usaha dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus.

2. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sebaiknya mengadakan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidang lingkungan hidup untuk turut serta melakukan pengendalian terhadap pengelolaan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Tanggamus.
3. Disarankan kepada pegawai atau petugas Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) sebaiknya ikut serta terhadap upaya pengendalian pencemaran udara dalam kegiatan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul,Khallaf,Wahhab. 1997. *Al-Siyasah al- Syar'iyat, Dar al-Anshor*, Qahirat.
- Agama,Departemen. 2005. *Al-Quran dan Terjemahan nya*, Bandung: CV Diponogoro.
- Al-Qardhawi,Yusuf, *Persepektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*.
- Ashshofa,Burhan. 2010. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto,Suharsim. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djazuli,H.A. 2017. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana.
- Husin,Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadi,Sutrisno. 2001 *Metodelogi Riset*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Iqbal,Muhammad. 2014. *Fiqh siyasah konstektualisasi doktrin politik islam*, Jakarta:Pranamedia Group.
- Kartono,Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Cet.VII). Bandung: Mandar Maju.
- Kansil dan Christine. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Koenjorodiningrat. *Metode-metode Penelitian* (Edisi III). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Madjjid,Nurcholish. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Manan, Abdul, 2015. *Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Persepektif Hukum Islam*, Jakarta.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal* (Cet.VII). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mawardi, al. 2006. *al-ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah.
- M.S, Kaelan, M.S. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Pradigma.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muklis, 2009. *Hukum Administrasi Lingkungan*, Jakarta: Setara Press.
- Nasional Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rahmadi, Takdir, 2012. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo.
- Shiddieqy, Ash, Hasby. *Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah.
- Sjadjali, Munawir sjadjali. 1991. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press.
- Sarman dan M. Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujanto, 1986. *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Taimiyah, Ibn. 1996. *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat, dar Al-Kutub al Arabiyat*, Beirut.

B. Jurnal

Irwantoni, “peranan *Siyasah Syar’iyyah* dalam Memahami nas-nas Agama”. Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 3, (Bandar Lampug: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 270-271. (On-Line), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html> ,(9 Desember 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Abdul Manan. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam. Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 2 Juli 2015.

M. Muhtarom Ilyas. Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. Sosial Humaniora Vol. 1, No. 2 November 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang.

Peraturan pemerintah No. 51 Tentang AMDAL.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemrerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.

D. Website

<https://kbbi.web.id/upaya>. (21 Februari 2018)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ulubelu,_Tanggamus, Di akses pada tanggal 21, Juli 2018.

